

Pe 100 R.
13
3122

X

Buku Putih

tentang

Peristiwa Madiun

Disusun dan diterbitkan
oleh

Departemen Agitprop CC PKI

11205/
2

CEK - 2001

322-412
BCL

TX 3122.
X

Buku Putih

tentang

Peristiwa Madiun

BAGIAN PERUSAHAAN	
TGL. TERIMA	: 26/07/50
NO. INDIK	: 38791-020-08
NO. BANGSODE	: 0800038791
NO. FAKTUR/RF	: -
ACAL ANGK	: 41087041

Disusun dan diterbitkan

oleh

Departemen Agitprop CC PKI

PER. NEG. R. I.

Sekedar Pengantar

Achir² ini, golongan² jang setjara tersembunji maupun terang²an setudju DI - TII dan gerombolan² pengatjau lainnja dibasmi, men-tjoba² untuk membelokkan perhatian umum dari bahaya jang sesungguhnya ada, dan mau me-nakut²i umum dengan „momok” jang tidak ada, jaitu „momok Madiun”.

Selama ini, kalau orang² tertentu membitjarakan Peristiwa Madiun, terutama mereka jang menganggap Komunisme lebih berbahaja daripada kolonialisme — seperti misalnja pemimpin² Masjumi dan PSI —, selalu me-nondjol²kan keterangan² palsu tentang kekedjaman² dijahak PKI dan menjembunikan kekedjaman² mereka sendiri, suatu pemaisuan, jang dengan sendirinja dibantu oleh pers, radio dan alat² propaganda lainnja jang dimiliki oleh golongan² dan pemerintah² reaksioner jang alu.

Tetapi Peristiwa Madiun bukanlah per-tama² soal kekedjaman, melainkan suatu soal politik, dan makaitu menghendaki penguraian dan analise setjara politik pula. Djuga kaum kolonialis Belanda, kalau berbitjara tentang Revolusi Agustus 1945 selalu me-nondjol²kan „kekedjaman dijahak Republik” dan menimbunikan hal² jang sebenarnya.

Penerbitan Buku Putih ini dimaksudkan untuk menjingkap tabir jang masih menutupi Peristiwa Madiun, dengan mengemukakan „kenjataan² jang dokumenter. Buku Putih ini bersifat sementara dan pada suatu waktu akan diperlengkap dan diperluas.

D.N. Aidit
Sekretaris CC PKI

Djakarta, September 1953.

*

Mengantar tjetakan kedua

Peristiwa Madiun adalah suatu soal jang tidak mungkin difahan, dengan fitnahan² atau hasutan², apalagi pemutarbalikan² atau rmaisan². Peristiwa Madiun hanya mungkin difahami djika diketahui kenjataan²nja dan duduk perkara jang sesungguhnya. Sebab itu, djuga untuk memenuhi permintaan² jang luarbiasa banjaknja, Buku Putih ini kita terbitkan untuk kedua kalinja.

Tjetakan kedua ini ditambah dengan beberapa fakta baru, terutama pendapat² umum jang dinjatakan sesudah Buku Putih tjetakan pertama terbit. Tetapi sifat-sementara dari Buku Putih ini masih tetap: suatu waktu buku ini akan diperluas dan diperlengkap.

Departemen Agüprop CC PKI

Djakarta, September 1954.

Pelaksanaan „rasionalisasi dan rekonstruksi” Angkatan Perang dan beberapa peristiwa lain jang mendahului Peristiwa Madiun

29 DJANUARI 1948. Kabinet presidensiil Hatta dibentuk dengan program : 1) „menjelenggarakan persetudjuan Renville”, 2) „mempertjepat terbentuknja Negara Indonesia Serikat”, 3) „rasionalisasi” dan 4) „pembangunan”.

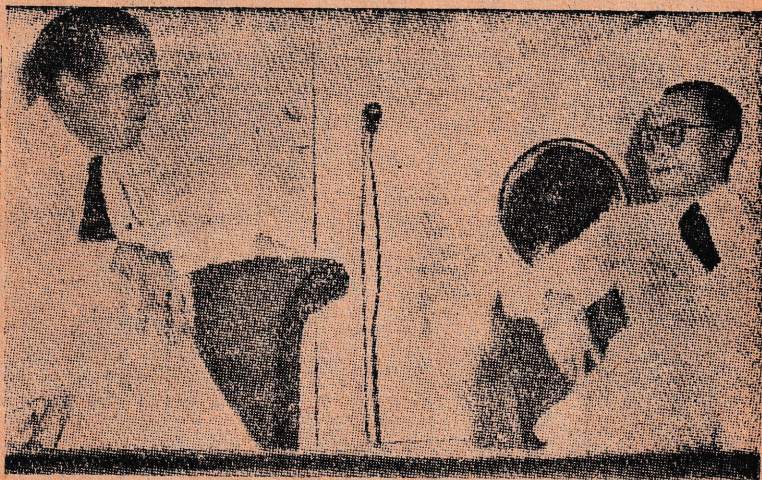
(„Lukisan Revolusi”, Kementerian Penerangan, halaman 362)

16 FEBRUARI 1948. Pemerintah mengeluarkan rentjana „rasionalisasi dan rekonstruksi” angkatan perang. Alasan Hatta jalah karena pradjurit2 TNI itu „tidak produktif”.

(Pidato Hatta dimuka BP-KNIP, 16 Februari 1948)

12 DAN 13 MARET 1948. Hatta bertemu Van Mook.

(„Aneta”, 12 dan 13 Maret 1948)



Diplomasi jang demokratis jalah, boleh tertutup terhadap musuh, terhadap Rakjat harus terbuka. Tetapi perundingan Hatta dan Van Mook dilakukan dibawah empat mata : ia terbuka bagi Van Mook, tetapi rahasia bagi Rakjat. Inilah permulaannja bentjana jang melampaui Republik dan Rakjat Indonesia.

19 MARET 1948. Panglima Besar djendral Sudirman menyatakan bahwa „rasionalisasi dan rekonstruksi” hendaknja didjalankan begitu rupa „sehingga tidak akan ada seorang warga Angkatan Perang jang tidak akan mendapat tempat dan penghargaan jang selajaknja”.

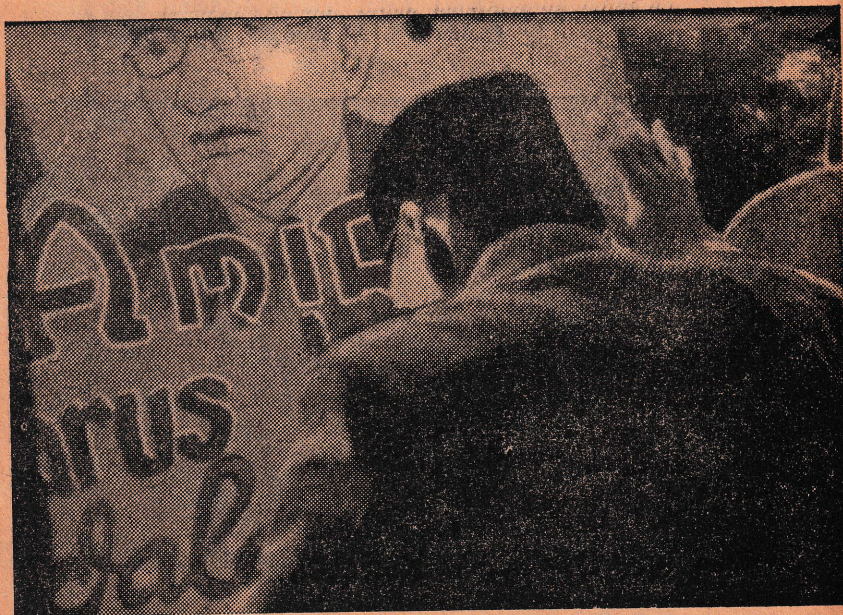
(*intervi kepada pers, 19-3-48, harian „Nasional” 20-3-48*)

10 APRIL 1948. Pertemuan Hatta-Van Mook di Djakarta. (*„Lukisan Revolusi”, hal. 363*)

APRIL 1948. Demonstrasi tentara dan pemuda di Djawa Timur menentang „rasionalisasi dan rekonstruksi”. (*harian „Buruh”, April 1948*)

20 MEI 1948. Divisi IV, divisi Penembahan Senopati mengadakan demonstrasi di Solo menentang „rasionalisasi dan rekonstruksi”.

(*harian „Buruh”, Mei 1948*)



Kemana sadja Presiden datang, Rakjat menuntut dibentuknja pemerintah front persatuan nasional jang tidak berkompromi, apalagi menjerah kepada Belanda.

DJUNI 1948. Perdana menteri Hatta menerangkan :
„Selama masa peralihan kita hendak merasionalisir TNI. Kita
hendak bekerdja bersama dengan Belanda untuk mempersiapkan
tentara federal dikemudian hari”.

(interviu kepada Daniel L. Schorr, warta-
wan „Christian Science Monitor”)

10 DJUNI 1948. Critchley, Australia, dan du Bois, Ameri-
ka, mengajukan suatu „usul kompromi” untuk mendamaikan
Republik dengan Belanda, dimana ditetapkan a.l. bahwa akan
dibentuk suatu pemerintah federal sementara, bahwa Angka-
tan Perang harus dikurangi, bahwa Republik akan menjerah-
kan kedaulatannya kepada pemerintah federal sementara, dll.

(dari brosur „5 Minggu sebelum Madiun
Affair”, susunan Derita S.P., penerbitan
„Sarkawi”, Medan)

16 DJUNI 1948. Dilangsungkan pertemuan informil an-
tara Hatta dan Van Mook.

(„Lukisan Revolusi”, hal. 363)

17 DJUNI 1948. Pemerintah Hatta mengeluarkan komu-
nike jang menjatakan bahwa „usul Australia-Amerika diang-
gap oleh pemerintah Republik sebagai suatu hal jang baik”.

(harian „Nasional”, 18 Djuni 1948)

DJULI 1948. Sekretariat Pusat FDR mengeluarkan se-
buah rentjana kampanye, memberikan petunjuk bagaimana
kampanje untuk terbentuknja suatu pemerintah front nasional
didjalankan dengan se-baik2nja. Rentjana kampanje jang di-
kirimkan ke-daerah2 dengan melalui pos itu, kemudian di-
palsu, a.l. oleh harian „Murba”. Solo, dimana ditambahkan
so-olah2 rentjana kampanje itu memuat soal „penggedoran,
pentjurian, pembunuhan, dll.”. Pemalsuan ini, baik oleh
sekretariat FDR Surakarta maupun oleh sekretariat pusat
FDR diadukan sebagai perkara kepada polisi, untuk diusut dan
diadili. Tetapi fihak kepolisian maupun kedjaksanaan tidak
mengurus pengaduan itu.

(dokumentasi FDR, djuga diumumkan
dalam semua harian di Djokjakarta, Djuli
1948)

2 DJULI 1948. Komandan Divisi IV, Divisi Penembahan
Senopati, kolonel Sutarto, dibunuh dengan tembakan pistol.

(harian „Nasional”, 6 Djuli 1948)

„Amerika ber-kali2 menjebut kolonel Sutarto dan djelas me-
namakannja sebagai musuh no : 1”.

*(Roger Vailland, dalam bukunja „Borobou-
dour”, penerbitan Paris, 1951, hal. 159)*

„teror atas Sutarto adalah rasionalisasi setjara lain”.

*(„Bintang Merah”, no : 12—13 th. 1951,
hal. 42)*

21 DJULI 1948. Dalam suatu konferensi **rahasia**, jang
diadakan di..... Sarangan, dimana tuan Hopkins, penasehat
urusan politik luarnegeri dari presiden Truman, turutserta,
pemerintah Indonesia memberikan djaminan jang diminta,
kepada Amerika.

*(Roger Vailland, dalam bukunja „Boro-
boudour”, halaman 73)*

21 DJULI 1948. Pertemuan antara dua orang Amerika,
tuan Gerard Hopkins, penasehat urusan politik luarnegeri dari
presiden Truman, dan Cochran, wakil Amerika pada Komisi
Djasa2 Baik PBB dengan enam orang Indonesia : presiden
Sukarno, tuan2 Mohamad Hatta, Natsir, Sukiman, Sukan to
dan Rum.

*(Roger Vailland, dalam bukunja „Borobou-
dour”, bab „La Nuit de Sarangan”, hal.
154)*

Konferensi Sarangan jang **rahasia** itu telah menelorkan pu-
tusan djahat..... jang bernama „Red drive proposals”, jaitu
rentjana..... jang disetudjui bersama oleh pemerintah Hatta
dengan pemerintah Amerika, lengkap disertai dengan ongkos-
ongkosnja.

*(„Bintang Merah” no : 12-13 th. 1951,
hal. 41)*

11 AGUSTUS 1948. Musso dan Suripno tiba di Djokja-
karta.

(„5 Minggu sebelum Madiun Affair”)

12 AGUSTUS 1948. Cochran pergi ke Djokjakarta.

(„5 Minggu sebelum Madiun Affair”)

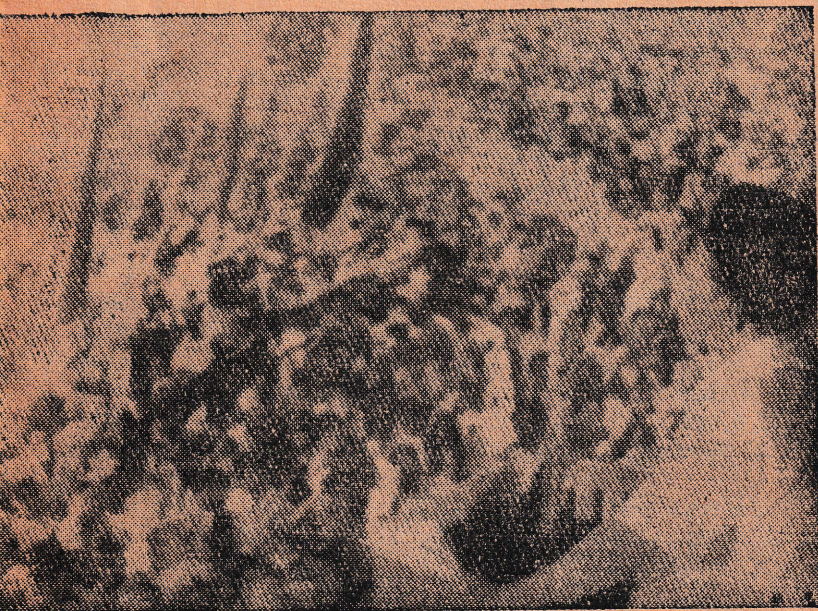
13 AGUSTUS 1948. Musso bertemu dengan Sukarno.
Sebelum berpisah, Bung Karno minta, supaja Pak Musso suka
membantu negara dan melantjarkan revolusi. Djawa Pak

Musso tak pandjang : „Itu memang kewadjiban saja. Tk kom hier om orde te scheppen !”

(harian „Revolusioner”, 19-8-1948)

16 AGUSTUS 1948. „Usul kompromi (Australia-Amerika) tadi mempunjai isi dilutjutinja Revolusi Nasional dalam lapangan ekonomi, politik dan militer. Dengan begitu kita disuruh menjerah, disuruh kapitulasi, disuruh melikwidir Revolusi Nasional dan Undang2 Dasar Negara Republik Indonesia”.

(Harjono, ketua umum SOBSI, dalam tulisannya „3 Tahun Merdeka”, harian „Buruh” 16-8-48)



Kemana sadja Musso datang dan berbitjara, Rakjat dengan hangat sekali menjambutnja dan menjetudjul program jang diadjukannya.

17 AGUSTUS 1948. „Imperialis Amerika dengan membawa Australia) menjodorkan suatu usul kompromi untuk memaksa Republik gulung tikar. Usul gulung tikar ini diterima baik oleh pemerintah likwidator-kanan Hatta-Sjafruddin & Co, jang meneruskan politik likwidasi Sutan Sjahrir. Usul likwidasi ini bermaksud melutjuti tentara revolusi, membekukan

perhubungan politik luarnegeri Republik, menindas demokrasi, dll. hal yang menguntungkan dan memperkuat kedudukan imperialisme.”

(D.N. Aidit, dalam tulisannya „17 Agustus 1948 — Bersatu dan terus berlawan”, „Bintang Merah” 19-8-48)

17 AGUSTUS 1948. „Kedatangan saja di Indonesia pertama kali bertudjuan untuk menghamba tanahair dan Rakjat-nja. Indonesia sekarang telah mempunjai Republik sendiri dan ia hingga tg. 17 Agustus 1948 ini telah berusia tiga tahun. Ini berarti bahwa kita telah merdeka dan berdaulat selama waktu itu. Tetapi oleh karena kedaulatan Republik kita masih dipersoalkan oleh Belanda saja seharusnya djuga berusaha untuk meneguhkan Republik kita. Peneguhan ini djalannya hanya satu, ialah memperkuat persatuan diantara semua Rakjat Indonesia..... untuk menentukan kedaulatan Republik kita dan melanggengkan, mengekalkan kemerdekaan negeri dan Rakjat-nja”.

(Musso, dalam tulisannya „Kepada Kawan2 Komunis Indonesia”, „Bintang Merah” 19-8-48)

26—27 AGUSTUS 1948. Central Komite pleno PKI mensahkan rentjana resolusi untuk diajukan kepada Kongres PKI jang ke-V, jaitu „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia”. Dalam rentjana resolusi ini ditetapkan taktik baru dari PKI, djuga ditetapkan bahwa Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis hendaknja meleburkan diri kedalam PKI.

Sebelum peleburan ini Partai Buruh dan Partai Sosialis akan mengadakan Kongres dibulan September, sedang PKI dibulan Oktober 1948.

(„Bintang Merah”, nomor istimewa, September 1948)

„..... ia (FDR) berharap untuk mentjapai ini (tudjuan-nja) melalui desakan dibubarkannya kabinet presidensiil Hatta dan dibentuknja suatu kabinet jang bertjorak parlementer (langsung bertanggungjawab kepada KNIP dan wakilnja Badan Pekerdja).....”

(George Kahin, dalam bukunya „Nationalism and Revolution in Indonesia”, penerbitan New York, 1952, halaman 260)

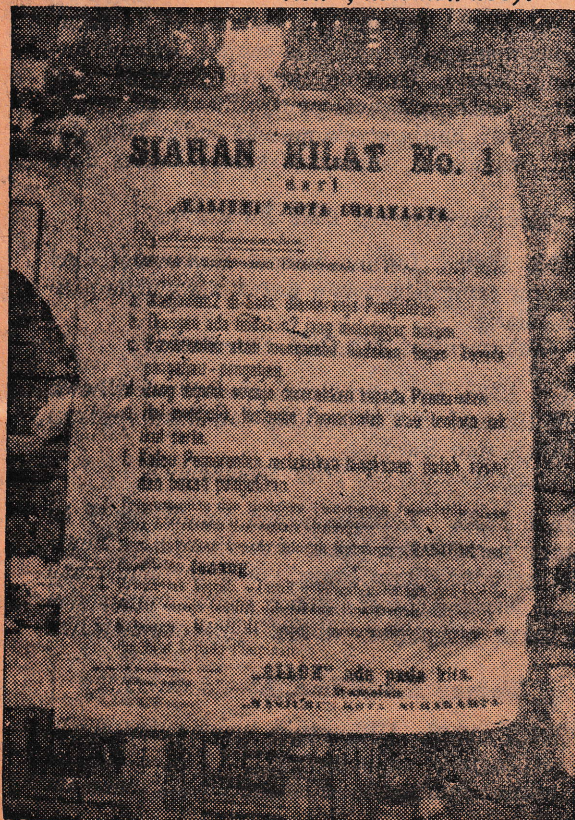
Permulaan provokasi kaum reaksi

1 SEPTEMBER 1948. Dua orang anggota PKI Surakarta, Slamet Widjaja dan Pardio, ditjuluk di Solo. Pentjulikan katanja dilakukan oleh gerombolan „liar”, tetapi kemudian ternyata, bahwa gerombolan itu samasekali bukannya liar, karena Slamet Widjaja dan Pardio kemudian ternyata dimasukkan dalam konsentrasi kamp pemerintah di Djokja.

(„Bintang Merah” no : 12—13 th. 1951 hal. 42, berdasarkan pengakuan dari jang ditjuluk sendiri, dan tjatatan kamp konsentrasi)

„Mungkin bahwa orang2 ini memang ditangkap atas perintah Pemerintah dan dipindahkan ke Djokjakarta”.

(George Kahin, „Nationalism and Revolution”, halaman 288).



Djuga Masjumi Surakarta turut menjiar-njiarkan seolah2 pemerintah „tak turut serta” dalam pentjulikan. Tetapi adanya Slamet Widjaja dan Pardio didalam kamp tawanan pemerintah adalah kenjataan jang tak mungkin dibantah.

3 SEPTEMBER 1948. „Pertanyaan terpenting sekarang menurut djurubitjara pemerintah Hindia Belanda itu ialah : apakah Hatta bisa tahan terhadap Partai Komunis jang besar itu”.

(interview djurubitjara „pemerintah Hindia Belanda” kepada „Aneta”, 3 Sept. 1948)

4 SEPTEMBER 1948. Menurut Antara-Aneta kementerian luarnegeri Amerika menjatakan bahwa Amerika Serikat akan melandjutkan pertolongannja kepada pemerintah Hatta.
(harian „Nasional”, 4 September 1948)

SEPTEMBER 1948. „Golongan Hatta adalah anti-komunis”.

(Andrew Roth, dalam „The Nation”, Amerika)

7 SEPTEMBER 1948. Kepala Staf Divisi IV, letnan-kolonel Sujoto, segera menugaskan kepada major Esmara Sungeng, kapten Sutarto, kapten Suradi, kapten Sapardi, dan kapten Mudjono untuk pergi mengusut pentjulikan2 itu, tetapi ke-lima2nja tidak kembali, hanja speda mereka sadja jang dapat diketemukan di Srambatan, dimarkas kompi Lukas dari Siliwangi.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

8 SEPTEMBER 1948. Letnan-kolonel Suharman dari TNI bagian Masjarakat jang ditugaskan untuk mengurus pentjulikan2 itu djuga hilang.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

9 SEPTEMBER 1948. Letnan-kolonel Suharman dibawa kemarkas bataljon Siliwangi di Tasikmadu, dan dikumpulkan dengan Slamet Widjaja dan Pardio.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

9 SEPTEMBER 1948. Letnan-kolonel Suadi pergi ke Djokjakarta menemui pemerintah pusat dan Panglima Besar Sudirman dan pada hari itu djuga Panglima Besar Sudirman memberi izin kepada letnan-kolonel Suadi untuk mengambil tindakan terhadap kaum pengatjau di Solo jang men-tjulik2 itu.

(„Bintang Merah” no. 12—13 th. 1951)

10 SEPTEMBER 1948. Ultimatum komandan divisi Penembahan Senopati kepada kaum pengatjau. Major Slamet Rijadi, komandan sektor Surakarta, dibantu oleh 2 bataljon

ALRI segera mengadakan manuver. Ultimatum itu menentukan bahwa jika pada 13 September jam 14.00 kelima opsir yang ditunjuk tidak dikembalikan, maka kaum pengatjan akan digempur.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

13 SEPTEMBER 1948. Musso pada 14 September 1948 mau mengadakan tjeramah disositet Harmoni, Solo. Tetapi karena mendengar ketegangan2 jang ada di Solo, Musso jang sedang ada di Purwodadi mengirim kurir ke Solo, menanyakan keadaan di Solo, dan kurir itu dikirim kembali oleh Seksi Komite PKI Surakarta dengan usul kepada Musso supaya tjeramah tidak dilandjutkan.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

Rentjana (Musso, Sjarifuddin, Wikana, dan Harjono) menetapkan untuk mengundjungi banjak kota-kota lainnja. Wonosobo..... misalnja, akan harus mengadakan rapat umum dimana berbitjara Musso pada tg. 24 September''.

„Kenjataan ini ditjantumkan dalam laporan resmi kepada pemerintah pusat oleh Djawatan Penerangan Wonosobo''.

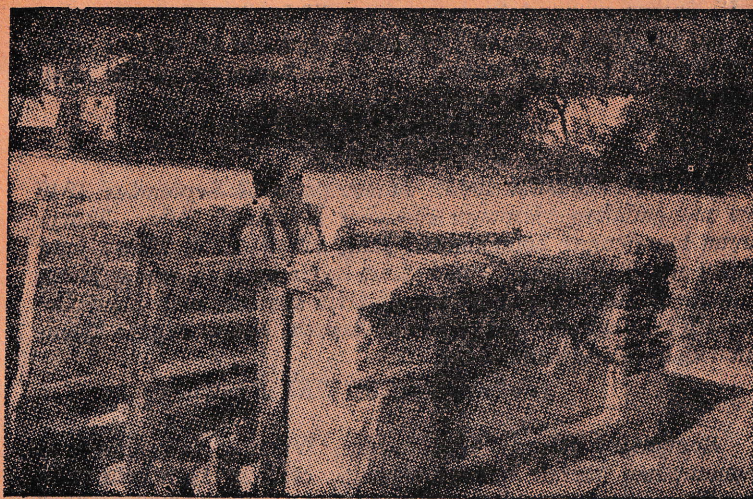
(George Kahin, „Nationalism and Revolution'', halaman 286)

13 SEPTEMBER 1948. Sebelum batas waktu ultimatum habis, jaitu pada jam 12.30, major Sutarno, jang datang ke markas fihak lain di Srambatan dengan membawa tugas dari Divisi untuk mengadakan perundingan, ditembak ketika turun dari truk, sehingga major Sutarno beserta beberapa orang pengawalnja mati seketika.

(disaksikan oleh penduduk sekitar markas Siliwangi di Srambatan, Solo)

13 SEPTEMBER 1948. Jam 14.00 tepat divisi IV dan ALRI terpaksa memulai operasinja. Jam 18.00 datang perintah dari pemerintah pusat supaya diadakan gentjatan-sendjata. Gentjatan-sendjata disaksikan a.l. oleh Panglima Besar sendiri, utusan2 Kehakiman Tinggi Militer, Residen Sudiro, dll. Divisi Penembahan Senopati mentaati gentjatan-sendjata, tetapi pemerintah pusat malahan mengirim balabantuan dari mana2 k. Solo, untuk membantu fihak jang lain, fihak jang dihadapi oleh divisi IV.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)



Kota Solo mendjadi saksi berlangsungja teror putih.

15 SEPTEMBER 1948. Karena gentjatan-sendjata tak mungkin dipatuhi oleh satu fihak sadja sedang fihak jang lainnja terus-menerus melanggarnja, maka mulai djam 18.00 Divisi Penembahan Senopati dibantu oleh ALRI memulai lagi operasinja. Sementara itu pemerintah pusat terus mengirim balabantuannja kepada fihak jang lain.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

15 SEPTEMBER 1948. „Pemerintah Hindia-Belanda” mengeluarkan komunike jang menjatakan bahwa „tiap2 aksi komunis adalah bertentangan dengan ketenteraman umum dan djatuh dibawah peraturan2 hukuman, jang melindungi ketenteraman umum”.

(„Keesings Historisch Archief” th. 1946—1948 halaman 7749)

SEPTEMBER 1948. „Tetapi kita harus melakukan ini (bekerjasama dengan pemerintah Hatta). Kalau tidak, kita akan menjerahkan Indonesia dengan sonder perlawanan sedikitpun kepada kaum avonturir dan kaum komunis”.

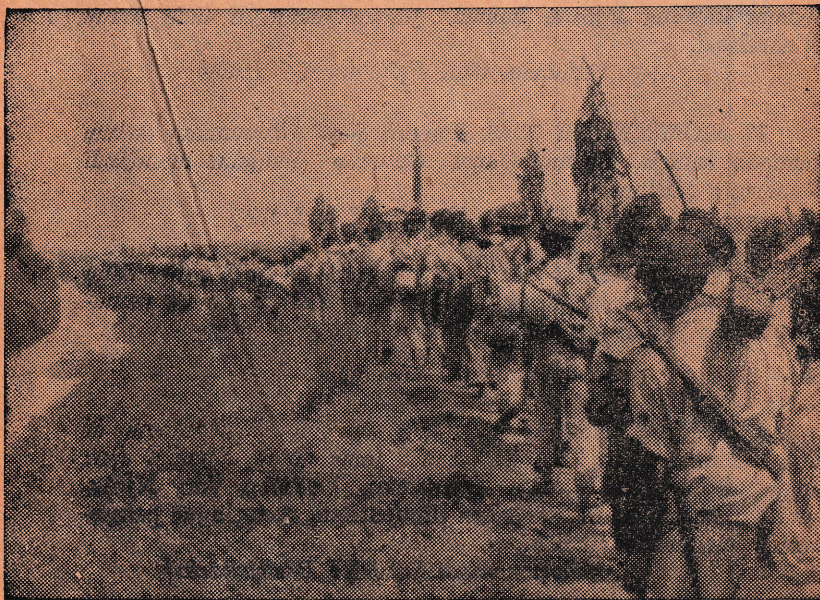
(interview Van Mook kepada E. A. Miguel Gaudfernau, „Envoyé spécial” dari „France Illustration”)

16 SEPTEMBER 1948. Gedung Dewan Pusat Pesindo di Djl. Singosaren, Solo, diserbu dan diduduki oleh kaum pengatjau. Pertempuran di Solo menghebat.

(dokumentasi SC PKI Surakarta)

16 SEPTEMBER 1948. Panglima Besar Sudirman mengeluarkan order harian a.l. sbb. : „Pada saat ini terdjadi suatu peristiwa di Surakarta jang langsung menjjinggung kedaulatan Angkatan Perang, yakni tertjuliknja anggota2 angkatan perang. Maka disini kami tegaskan : Angkatan Perang supaja bulat bersatu terhadap fihak manapun jang berusaha mengatjaukan atau melanggar kekuasaan dan kedaulatan Negara, dan harus serentak menghadapinja”.

(order harian Panglima Besar)



Djenderal Sudirman menginstruksikan Divisi Penembahan Senopati untuk bertindak terhadap kaum pengatjau, tetapi pemerintah Hatta malahan mengivimkan balabantuan kepada mereka jang memusuhi Divisi Penembahan Senopati.

16 SEPTEMBER 1948. Perintah Panglima Besar kepada Komandan CPM Djawa „untuk mengusut dan menuntut jang bersalah mengenai pentjulikan opsir2 dan mengambil tindakan tegas terhadap pasukan jang menjerang satuan Korps Reserve Umum pada tg. 13 jang lalu di Solo”.

(Perintah Panglima Besar, harian „Nasional”, 16 September 1948)

17 SEPTEMBER 1948. Politbiro CC PKI mengadakan sidang di Djokja, al. membitjarakan soal pertempuran di Solo. Politbiro memutuskan untuk berusaha keras supaja pertempuran di Solo dilokalisasi. Djuga diputuskan mengutus anggota Politbiro Suripno, jang kebetulan akan berbitjara didalam rapat jang diselenggarakan oleh Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia di Madiun, untuk menjampaikan kepada Musso, Amir Sjarifuddin dan anggota2 Politbiro lainnja jang sedang keliling Djawa, bahwa pertempuran di Solo harus dilokalisasi.

(dokumentasi Politbiro CC PKI)

17 SEPTEMBER 1948. Daerah Solo diumumkan dalam keadaan bahaya. Kolonel Gatot Subroto diangkat mendjadi Gubernur Militer.

(„Lukisan Revolusi”, hal. 366)

17 SEPTEMBER 1948. Konferensi SBKA digedung SOBSI, Tugu, Djokjakarta, dikepung oleh pasukan2 pemerintah dan pemimpin2 SBKA ditangkap.

(dokumentasi SBKA)

18 SEPTEMBER 1948. Rapat SC PKI Djokjakarta di Djl. Gondomanan, Djokjakarta, jang djuga dihadiri oleh anggota2 Politbiro Maruto Darusman, Lukman dan Njoto, sesudah semua hadir, terpaksa dibubarkan, mengingat pengalamanan konferensi SBKA.

(dokumentasi SC PKI Djokjakarta)

Petjahnja peristiwa di Madiun

18 SEPTEMBER 1948. Rombongan Musso-Amir Sjari-fuddin es. sampai di Tjepu, sebelum ke Magelang dan Purwo-rejo, meneruskan rapat2 umumnja. Suripno berangkat ke Madiun dengan kereta-api pagi dari Djokja (kebetulan ber-sana2 dominé F. Harahap jang kemudian djuga menjaksikan sendiri apa2 jang sesungguhnja terdjadi di Madiun). Semen-tara itu keadaan di Madiun sedjak beberapa waktu telah men-djadi hangat, karena pasukan2 jang dikirim langsung oleh pemerintah pusat menduduki pabrik2 gula, mengadakan „la-tihan2” sendiri sonder memberitahu pasukan2 TNI setempat, memukul buruh Balai Kota dan menembak mati seorang buruh kereta-api Madiun jang pagi2 berangkat kebengkel.

(dokumentasi SC PKI Madiun)

19 SEPTEMBER 1948. Mulai djam 01.00 sampai 08.00 pasukan TNI setempat (Brigade 29) melutjuti pasukan2 jang dikirimkan pemerintah pusat dan pasukan Mobrig, suatu insi-den jang bukan untuk pertama kalinya, bahkan sudah ber-kali2 terdjadi selama sedjarah Republik.

(dokumentasi SC PKI Madiun)

19 SEPTEMBER 1948. Di Kediri dilangsungkan Kongres PEI. Tetapi karena Kongres mendengar pidato pemerintah jang diutjapkan oleh presiden dengan begitu tiba2, maka se-sudah disahkan peleburan PBI kedalam PKI Kongres segera dibubarkan.

Djuga Kongres Partai Sosialis rentjananja segera akan diadakan, sedang PKI sendiri akan mengadakan kongresnja jang ke-V bertempat di Balai Pradjurit, Ngabean, Djokjakarta, pada awal Oktober.

(dokumentasi CC PKI)

19 SEPTEMBER 1948. Tan Ling Djie, sekretaris-djen-deral II PKI. jang sedang menjjapkan pidato untuk sidang BP-KNIP esokpaginja, ditangkap dirumahnja di Djl. Dieng 1, Djokjakarta.

Djuga anggota Politbiro, Abdulmadjid, ditangkap di Djokja, sedang sekretaris-djenderal III dan IV, Maruto Da-rusman dan Ngadimanpun berada di Djokjakarta.

(dokumentasi CC PKI)

19 SEPTEMBER 1948. Di Madiun karena residen ternjata bepergian, padahal harus ada jang bertanggungjawab atas keamanan didaerah tsb., maka wakil walikota Madiun, Supardi atas usul organisasi2 Rakjat diangkat sebagai pemangku residen.

(siaran RRI Madiun)

19 SEPTEMBER 1948. Pengangkatan itu ditandatangani juga oleh komandan teritorial, overste Sumantri, wakil residen, Isdharto, dan walikota Purbo.

(„Keesings Historisch Archief” th. 194—1948, hal. 7759)

19 SEPTEMBER 1948. Overste Sumantri, Isdharto dan Supardi, atas nama pemerintah daerah mengirim kawat keperintah pusat di Djokjakarta sbb : „Di Madiun terdjadi perlutjutan oleh kesatuan Brigade 29 atas bataljon Siliwang dan Mobrig, berhubung dengan kepergiannja kepala daerah dan walikota sedang sakit, untuk sementara pimpinan pemerintahan daerah kami pegang, keadaan aman kembali. Minta instruksi2 lebih landjut. Laporan tertulis segera menjusul”.

(siaran RRI Madiun)

19 SEPTEMBER 1948. Pemerintah Hatta menuduh PKI di Madiun mengadakan „coup d’etat” dan mendirikan „pemerintah Sovjet”, pemerintah menjerukan supaya orang2 FDR „dibasmi”. Tuduhan dan seruan pemerintah ini diutjapkan dengan perantaraan pidato Presiden dimuka radio, pada malam hari itu.

(dokumentasi Kementerian Penerangan)

20 SEPTEMBER 1948. Perdana menteri Hatta meminta BP-KNIP memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden selama waktu 3 bulan dengan alasan : „Tersiar pula berita — entah benar entah tidak — bahwa Musso akan mendjadi Presiden..... dan Amir Sjarifuddin Perdana Menterinja”.

(dari pidato Hatta dimuka BP-KNIP, „Pepora” seri 2, „Mendajung antara dua karang”, penerbitan Kementerian Penerangan, 1951; kursif dari penjusun)

20 SEPTEMBER 1948. Dalam sidang BP-KNIP itu hadir mr. Luat Siregar, anggota fraksi PKI, dan K. Werdojo, anggota fraksi Buruh, suatu hal jang mustahil terdjadi sekiranja PKI punja rentjana „memberontak”.

(dokumentasi fraksi PKI dalam BP-KNIP)

20 SEPTEMBER 1948. Diumumkan „Undang2 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya” „untuk mengadakan peraturan2 dengan menjimpang dari Undang2 dan peraturan2 jang ada”.

(dokumentasi BP-KNIP)

20 SEPTEMBER 1948. Ketua Masjumi, sdr. Sukiman, dalam pidato radionja mengumumkan „perang sabil” terhadap PKI, sedang Sultan Hamengkubuwono „menjatakan berdiri dibelakang pemerintah Hatta, karena pemerintah Hatta berarti pembangunan”.

(„Keesings Historisch Archief” th. 1946—1948, hal. 7759)

21 SEPTEMBER 1948. Berkata mr. Stikker (menteri luarnegeri Belanda), djika diminta, bersedia memberikan bantuannja untuk membereskan Peristiwa Madiun.

(„Lukisan Revolusi” hal. 366)

21 SEPTEMBER 1948. Hatta jang mengetahui bahwa „menerima bantuan dari Belanda berarti bunuhdiri politik”, hanja menerima bantuan jang tak terang2an, sedang kepada pers dia menerangkan bahwa Peristiwa Madiun „akan diselesaikan sendiri”.

(dari „De Groene Amsterdammer”, 25 September 1948)

21 SEPTEMBER 1948. Van Mook jang berada di Nederland dengan ter-buru2 pulang ke Djakarta karena soal Madiun.

(„Lukisan Revolusi”, hal. 366)

21 SEPTEMBER 1948. Van Mook menerangkan : „Saja kira, pengaruh kedjadian ini bukannya tidak baik. Oposisi terhadap kerdjasama dengan Belanda akan berkerumun disekeliling kaum komunis, dan difihak lain mereka jang setudju bekerdjasama dengan Belanda akan berhimpun. Ini hanja berarti pendjernihan”.

(interview kepada „ANP”, 21-9-48)

21 SEPTEMBER 1948. Letnan-djendral Spoor menerangkan : „Belanda mengikuti keadaan dengan tjermat. Bisa kita bajangkan bahwa komunisme melalui infiltrasi di Madiun dapat menjerbu ke-daerah2 jang dikuasai Belanda. Djika ini terdjadi, akan diambil tindakan2 jang setimpal”.

(interview kepada „Reuter”, 21-9-48)

SEPTEMBER 1948. Beberapa minggu jang lalu Tan Malaka dan pengikut2nja dilepaskan, untuk keperluan pembentukan suatu blok anti-Musso jang kuat didalam Republik.
(„New York Herald Tribune”, 26 September 1948)

SEPTEMBER 1948. Suatu provokasi dari trotskis Tan Malaka memberikan alasan kepada pemerintah Djokja untuk melikwidasi elemen2 komunis dari Angkatan Perang.
(Roger Vailland, dalam „Boroboudour”, halaman 73)

SEPTEMBER 1948. John Coast mengadjak Sjahrir pergi ke Washington, PBB dan New Delhi, Kairo dan London. Djawab Sjahrir : „Bagaimana saja bisa pergi *sekarang*, sebelum kita tahu hasil dari aksi militer kita terhadap Madiun ?”
(John Coast, dalam bukunja „Recruit to Revolution”, halaman 196)

22 SEPTEMBER 1948. Komandan Brigade, letnan-kolonel Suharto, datang dari Djokja untuk menjaksikan sendiri keadaan di Madiun. Ia kembali ke Djokja membawa surat2 dari berbagai kepala djawatan jang menjatakan bahwa keadaan di Madiun aman dan normal, dan ia djuga membawa pesanan dari Musso supaja diadjukan sebagai usul kepada pemerintah pusat : 1) untuk mengachiri pertempuran, dan ber-sama2 melawan Belanda, 2) program nasional supaja didjadikan program pemerintah dan dasar untuk membentuk kabinet front nasional.
(„Bintang Merah” no : 12—13 th. 1951, hal. 47—48)

22 SEPTEMBER 1948. Djendral-major Djokosujono mengadakan pidato radio di Madiun, dimana ia menjerukan kepada semua komandan TNI di Djawa Timur untuk menghindari perang saudara, dan untuk ber-sama2 melawan Belanda.

(„Keesings Historisch Archief” th. 1946—1948, hal. 7760)

23 SEPTEMBER 1948. Amir Sjarifuddin dimuka tjorong Radio Madiun mengatakan : „Perjuangan jang kita lakukan sekarang tidak lebih tidak kurang daripada gerakan untuk mengoreksi djalannja revolusi. Makaitu dasarnja tetap sama dan tidak berubah. Revolusi menurut pendapat kita tetap berwatak nasional, jang dapat disebut revolusi burdjuis demo-

kratis. Konstitusi kita tetap sama ; bendera kita tetap Merah Putih ; sedang lagu kebangsaan kita tidak lain daripada Indonesia Raya''.

(harian „Front Nasional'', Madiun, 24 September 1948)

25 SEPTEMBER 1948. Sjahrir menerangkan bahwa dia menganggap perspektif untuk perundingan dengan Belanda mendjadi lebih baik.

(„Keesings Historisch Archief'', th. 1946—1948, hal. 7778)



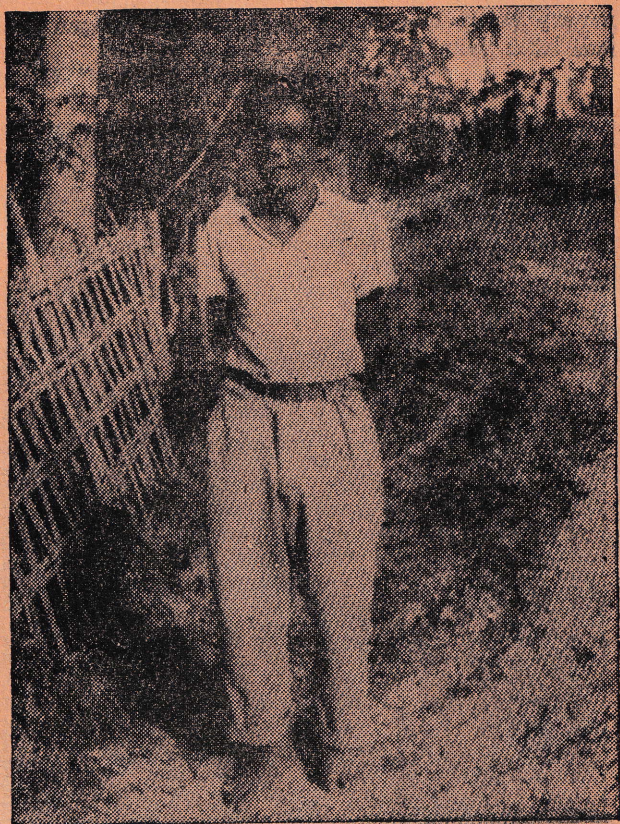
Ketika Bung Amir tertangkap. Tangannja diborgol.

28 SEPTEMBER 1948. Djokja mentjari pendekatan kepada Federasi.

(harian „Nieuwsgier'', 28 September 1948)

1 OKTOBER 1948. Pemerintah Hatta akan lebih berorientasi ke-negara2 Barat dan chususnja Amerika, untuk mendapatkan bantuan.

(keterangan menteri penerangan Moh. Natsir)



Bung Harjono djuga diikat tangannja. Kakinja telandjang, katjamatanja hilang.

19 DESEMBER 1948. Aksi militer Belanda jang kedua.
*(„Peaceful settlement in Indonesia” per-
nerbitan PBB, hal. 20)*

19 DESEMBER 1948. Sebelas orang pemimpin dan anggota PKI dibunuh di Ngalihan, Surakarta, dengan tidak melalui proses apapun, dengan tidak diperiksa terlebih dulu. Tentang ini pihak kepolisian daerah Surakarta, memberikan keterangan sbb .:

„Kepala kepolisian karesidenan Surakarta dengan ini menerangkan bahwa : betul pada hari Minggu tg. 19—30 Desember 1948 djam 23.30 oleh Pemerintah telah diberikan hukuman setjara Militer kepada 11 orang jang tersangkut dalam Peristiwa Madiun, jalah :

1. Mr. Amir Sjarifuddin, 2. Suripno, 3. Drs. Maruto Darusman, 4. Sardjono, 5. Djokosujono, 6. Oei Gee-hwat, 7. Harjono, 8. Katamhadi, 9. Sukarno, 10. Ronomarsono, 11. D. Mangku, didesa Ngalihan Kalurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar Karesidenan Surakarta.



Bung Ripno ketika tertangkap. Djuga diborgol.

Selandjutnja majat dari 11 orang tersebut dikubur djadi satu lobang ditempat itu djuga.

Harap jang berkepentingan mendjadi maklum adanja'.

(surat keterangan No: Pam/8124/Ktr. tanggal 20 Sept. 1950, ditandatangani oleh Kepala Bagian P.A.M./Kriminil, Komisaris Polisi II, Sempu Muljono, atas nama Kepala Kepolisian Surakarta)

DESEMBER 1948. Dimana-mana pemerintah melakukan pembunuhan dengan sonder melalui proses apapun. Didalam pendjara Magelang 31 anggota dan simpatisan PKI dibunuh, di Kediri ber-puluh2 termasuk dr. Rustam, anggota fraksi PKI dalam BP-KNIP, di Pati antara lain dr. Wioreno, dan banyak lagi lainnja.

(dokumentasi CC PKI)



Bendera Merah Putih disalahgunakan untuk melakukan pembunuhan jang tidak berdasarkan hukum dan keadilan,

„Negara-Hukum adalah Negara jang diperintah oleh hukum (recht) Artinja Negara itu tidak boleh diperintah (dikuasai) oleh sentimen dari orang2 tadi. Siapapun djuga orang-nja jang disertai mendjalankan kekuasaan Negara, dia harus tunduk kepada dan banja mendjalankan kewadjabannja berdasarkan atas hukum jang berlaku dalam Negara itu”.

(mr. S. Purwokusumo, dalam brosurnja „Pemberontakan Madiun ditindjau dari Hukum Negara kita”, hal. 9)



Rupa2nja karena dengan sebutir peluru tidak jakin bisa mematikan djiwa seorang patriot, maka selalu dipakai empat bedil sekaligus.

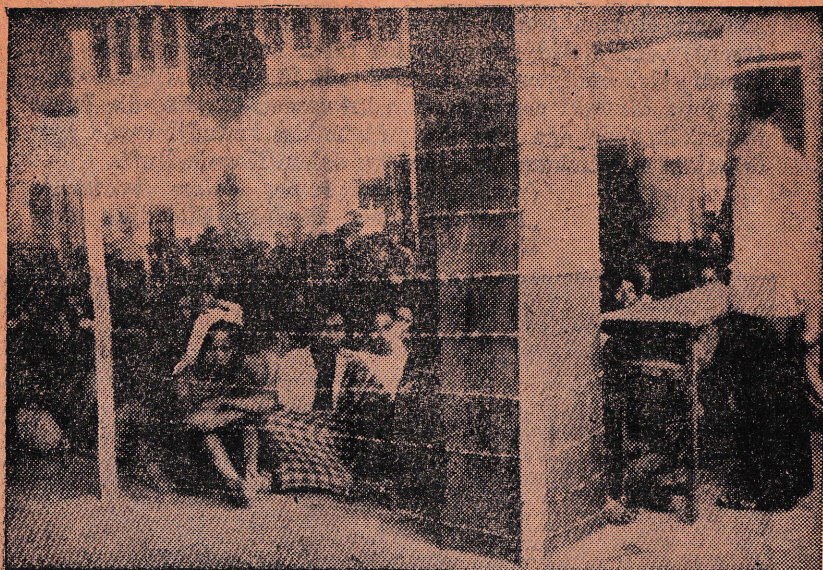
7 MEI 1949. Persetujuan Rum—Royen ditandatangani.
(„Lukisan Revolusi”)

23 AGUSTUS 1949. Konferensi Medja Bundar (jang masing2 delegasinja dikepalai oleh Drees-Hatta-Sultan Hamid) bersidang di Den Haag.

(„Peaceful settlement in Indonesia”,
hal. 20)

2 NOVEMBER 1949. Konferensi Medja Bundar berachir dengan hasil jang „sangat memuaskan”.

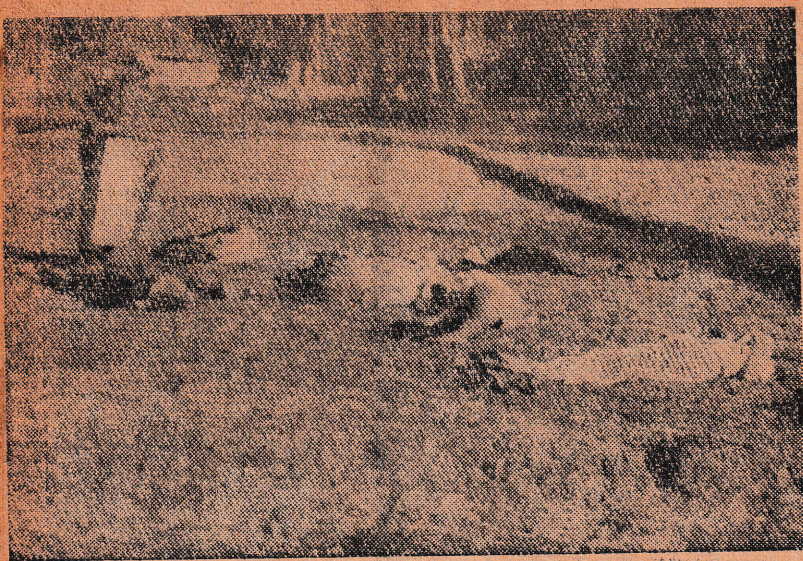
(„Peaceful settlement in Indonesia”,
hal. 20)



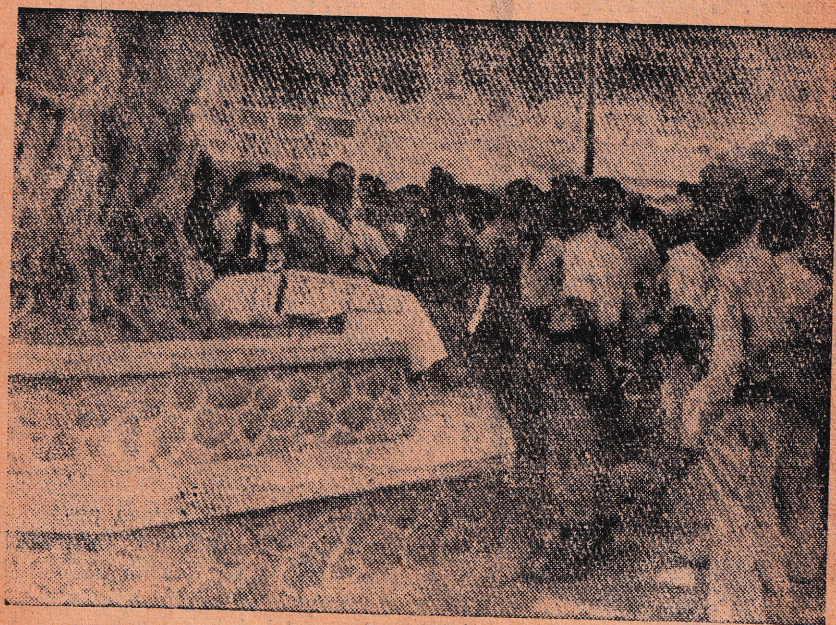
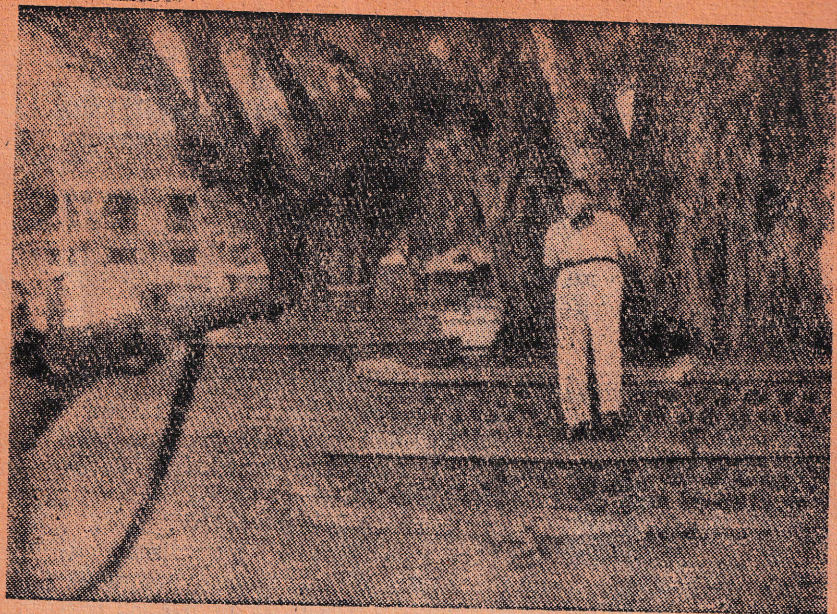
Atas : beginilah kamp tawanan pemerintah memperlakukan kader2 gerakan Rakjat. Bawah : diantara mereka jang sender pemeriksaan akan ditembak mati.



Dua pemandangan lain ketika pelor jang tak berhukum dan tak berkeadilan menembus pemimpin2 Rakjat.



Atas : Merah Putih itu sudah tidak bersih lagi. Bawah : Sekretaris Umum SC PKI Pati, dr. Wiroreno dengan tabah menghadapi tem-
bakan mati yang akan dilakukan terhadapnya.



Atas : Dr. Wirorhe ketika ditembak, Bawah : Achiraja dia meninggal untuk tjita2 pembebasan umatmanusia.

Beberapa keterangan jang menjimpulkan

1. Kekatjauan itu sebenarnja mulai beberapa waktu sebelumnja, tidak di Madiun, melainkan di Solo, dimarkasbesar (Dewan Pusat) Pesindo.
(*John Coast dalam bukunya „Recruit to Revolution”, hal. 194*)
2. Baik Musso maupun Suripno tidak bersiap untuk berkelahi atau memberontak pada waktu itu.
(*„Recruit to Revolution”, hal. 195*)
3. „Pada umumnja dalam pertengahan September 1948 pemimpin2 PKI baru mulai mereorganisasi dan memperkuat organisasi mereka. Mereka tidak mengharap akan mampu untuk melakukan sesuatu jang mendekati keefektifan untuk waktu se-kurang2nja enam minggu”.
„Mereka dihadapkan pada suatu *fait accompli*”.
„..... ketidaksiapan pemimpin2 pusat PKI untuk mengubah taktik revolusioner dibuktikan oleh kenyataan bahwa beberapa jang terpenting diantara mereka tidak tahu apa2 tentang apa jang terdjadi di Madiun ketika, dengan sangat terke-djut, mereka ditangkap di Djokjakarta pada pagihari tg. 19. Diantara mereka2 terdapat orang2 pusat seperti Tan Ling-djie, Abdulmadjid, Djokosudjono, dan ir. Sakirman”.
(*George Kahin, „Nationalism and Revolution in Indonesia”, halaman 284, 286, 294 - 295*)
4. „Sudah dibulan Djuli tahun ini (1948), lama sebelum ada persoalan fusi antara ketiga partai klas buruh dari FDR mendjadi PKI baru, dan ketika orang samasekali belum tahu dimana Musso berada dan apakah ia masih hidup, di Djokja dilakukan aksi2 terhadap FDR..... Aksi2 terhadap FDR, kemudian terhadap PKI baru ini, mentjapai puntjaknja didalam peristiwa2 disekitar Madiun.....”
(*„Politiek en Cultuur”, Amsterdam, Desember 1948, halaman 377*)
4. „Peristiwa Madiun sesungguhnya merupakan :
 - a. suatu insiden perlutjutan sendjata belaka antara pasukan2 bersendjata jang resmi, jang kemudian diikuti oleh pengangkatan kepala pemerintahan daerah Madiun untuk sementara jang tetap mengakui pimpinan Pemerintah Pusat di Djokjakarta. Tindakan pengang-

katan ini disetudjui sepenuhnya oleh pembesar2 militer dan sivil daerah Madiun.

- b. Pembelaan diri dengan sendjata dari Rakjat dan tentara jang konsekwen anti-imperialis, terdjadi sesudah ada pidato Pemerintah jang diutjapkan oleh Presiden pada tg. 19 September 1948 malam jang memerintahkan serangan umum bersendjata dan penangkapan serta pembunuhan umum dengan se-wenang2.
- c. Pembelaan diri tsb. disempurnakan dengan tindakan penjusunan kekuatan Rakjat dengan membentuk Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun jang diikuti oleh daerah2 lainnja di Djawa Timur dan Djawa Tengah''.

(dari „Keterangan CC PKI tentang Peristiwa Madiun'', 6 Februari 1951)

6. „Akibat berhasilnja provokasi pemerintah Hatta ialah :

- a. Terpetjah-belahnja persatuan nasional anti-imperialis jang sedang digalang oleh PKI, berdasarkan Program Nasional jang telah disetudjui oleh segenap partai2 dan organisasi Rakjat.
- b. Hantjurnja kekuatan Revolusi Nasional anti-imperialis antara lain dengan adanya pembunuhan dan ditangkapnja 36.000 orang jang mendjadi tulang-punggung revolusi. Dan kedjadian inilah terutama jang melantjarkan penjerbuan tentara Belanda dalam perang-kolonial II, serta memudahkan didjalankannja politik menjerah dari pemerintah kepada Belanda''.

(dari „Keterangan CC PKI tentang Peristiwa Madiun'', 6 Februari 1951)

7. Apakah sebetulnja Peristiwa Madiun itu? Hampir setahun sampai sekarang, sedjak PKI mengumumkan sebuah keterangan tentang Peristiwa Madiun. Dalam statement itu PKI mendjelaskan duduknja perkara jang sesungguhnya. Hampir satu tahun sudah lewat, dan dari pemerintah tidak satu kalipun pernah ada sangkalan atau bantahan tentang kebenarannja.

Ketika itu insiden antara sepasukan TNI dengan sepasukan TNI jang lain bisa diselesaikan dengan djalan damai, seperti halnja banjak insiden2 militer selama sedja-

rah Republik telah dapat diselesaikan dengan djalan damai. Tetapi djalan ini tidak ditempuh oleh pemerintah ketika itu.

(Pidato S. Utarjo, acting ketua fraksi PKI dalam Parlemen, dalam debat dengan P.M. Sukiman tentang Razzia Agustus, risalah Parlemen, Oktober 1951)

8. Duduk perkara Peristiwa Madiun jang sebenarnja makin lama makin terang bagi Rakjat banjak. Dan pula sudah diketahui bahwa Peristiwa Madiun adalah persiapan untuk mengadakan Konferensi Medja Bunder (KMB), sedangkan hasil KMB ini samasekali merugikan Rakjat Indonesia.

(dari tulisan „19 September”, „Bintang Merah” No: 3 th. 1950)



Tubuh mereka mati dan dikubur di Ngalihan, tetapi tjita2 mereka terus hidup dalam kalbu setiap patriot.

9. „..... mengapa sampai sekarang Hatta tidak pernah berusaha menundjukkan mana Dongeng dan mana Kebenaran dalam tjerita Sarangan itu, satu tjerita jang k a l a u b e n a r, amat mentjemarkan Dwi-Tunggal.....”.

(harian „Pikiran Rakjat”, Bandung, September 1953)

10. „..... mengenai dengan andjuran jang baru pula terdengar..... dari persatuan bekas pedjuang Islam di Jogja, jang telah memutuskan dan mendesak kepada pemerintah supaya tgl. 18 September hari permulaan terdjadinja affair Madiun ditetapkan mendjadi hari berkabung..... apakah tidak lebih tepat ditjari sadja hari berkabung jang menimbulkan kebulatan bangsa Indonesia..... hari berkabung jang lebih tepat, misalnja tgl. 21 Djuli 1947 ketika agresi Belanda ke 1 dan tanggal 19 Des. 1948 hari agresi Belanda ke 2.....”

(harian „Waspada”, Medan, September 1953)

11. „Apa jang terdjadi dengan Amir Sjarifuddin, seorang pemimpin jang mempunyai watak jang bersih dan jang tinggi karatnja, ketika kemudian dia menemui adjalnja pada peristiwa Madiun adalah sukses jang paling besar jang pernah ditjapai oleh golongan sosialis kanan, oleh karena dia telah sanggup mengelimineer Sjarifuddin dengan mempergunakan pemimpin2 lainnja..... Kalau Sjarifuddin masih hidup maka akan lebih banjak hal2 jang memberatkan bagi sosialis kanan ini jang dapat dibongkar dan berguna bagi proses pertumbuhan negara ini. Bersama Amir musnah pula sebagian dari kesemua bangsa kita, seperti Maruto Darusman dan Suripno, lagi seorang pemuda jang brillian.....”

(B. M. Diah, dalam harian „Merdeka”, Djakarta, 23 November 1953)

12. „Mengapa baru sekarang mereka (kaum reaksi) ber-kaok2. mengapa pada 18 September 1951 dan 1952 mereka t i d a k membuat kampanye seperti sekarang ? Mengapa dalam menggugat2 Peristiwa Madiun itu mereka bungkam dalam segala bahasa mengenai DI, TII, dan gerombolan2 teror lainnja ?”

(„Harian Rakjat”, Djakarta, 21 September 1953)

13. „Tentang peristiwa Madiun „Buku Putih” jang diterbitkan oleh sekretariat Agitasi-Propaganda CC PKI belum ada djawabannja jang djelas dan didalam bentuk jang sepadan dari pihak manapun”.

(Sugardo, dalam mingguan „Mimbar Indonesia”, Djakarta, 26 Djuni 1954).

I s i

1. Sekedar Pengantar hal. 2.
2. Pelaksanaan „rasionalisasi dan rekonstruksi” Angkatan Peran dan beberapa peristiwa lainnja jang mendahului Peristiwa Madiun..... hal. 3.
3. Permulaan provokasi kaum reaksi hal. 9.
4. Petjahnja peristiwa di Madiun hal. 15.
5. Beberapa keterangan jang menjimpulkan ... hal. 28

Harga Rp. 2.—